

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA
TERHADAP PUTUSAN PN PADANG NOMOR 11/PID.SUS-
TPK/2020/PN PDG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagaian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



NAMA : MIFTAHUL KHOIRIYAH

NIM 191000474201007

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITASI MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

SOLOK

2024

No. Registrasi: 535/FHUK-UMMY/VIII-2024

**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Terhadap Putusan PN
Padang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg**

**Nama : Miftahul Khoiriyah, NPM: 191000474201007, Fakultas: Hukum,
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, Pembimbing I : Rifqi Devi
Lawra S.H,M.H, Pembimbing II : Yulfa Mulyeni S.H, M.H.**

Abstrak

Dalam proses perkara pidana dalam kasus tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP, kasus korupsi dilakukan oleh terdakwa T telah terkait kasus penyelewengan dana desa sebesar Rp.553.127.113 (lima ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah) selanjutnya dipersidangan terbukti T telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kemudian hakim menjatuhkan pidana penjara selama hukuman 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yakni: 1. Apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan tindak pidana dana desa terhadap putusan PN Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN Pdg 2. Bagaimana tinjauan yuridis tindak pidana korupsi dana desa terhadap putusan PN Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian normatif (*normative law research*) yaitu menggunakan studi kasus normatif yaitu Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg. Sumber data yang dipergunakan adalah Data sekunder adalah bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg. Teknik pengumpulan data yang penelitian ini adalah studi dokumen. Dan teknik analisis data menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan Interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu 1. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan tindak pidana korupsi dana desa terhadap Putusan PN Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg yaitu posisi kasus, pertimbangan yuridis, analisis penulis. 2. Tinjauan yuridis tindak pidana korupsi dana desa terhadap Putusan PN Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atas perubahan Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Chabib Soleh - Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Fokus Media, Bandung, 2014

I Gusti Ketut Ariawan, *Buku Ajaran Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Ubayana, Bali, 2015

Muhamim, *Penelitian Hukum*, Mataram Universita Press: Mataram-NTB, 2020

Nasurullah, *Buku Pintar Dana Desa- Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2019

Pujiyono, *Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Terbuka: Tangerang Selatan, 2017

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

Sri Mulyani Indarawati, *Buku Saku Dana Desa- Dana Desa Demi Kesejahteraan Rakyat*, Mentri Keuangan, Jakarta, 2017

Sri Wahyuni - Darmawan Suriyanto, *Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Rakyat*, Mentri Keuangan, Jakarta, 2018

Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Zifatma Jawara, Sidoarjo, 2011

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018

Suharrizal, *Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Medan Area, Medan, 2012

Tolib Efendi, *Buku Ajaran Pemberantasan Tindak Korupsi*, Scopindo Media
Pustaka, Surabaya, 2019

2. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

3. Jurnal

Johari, *Kebeneran Materil dalam Kajian Hukum Pidana*, *Jurnal Ilmu Hukum Reusum*
Vol. VIII. No 2, 2020, Diakses pada tanggal 05 September 2020 pukul 12.39

Olga A. Pangkrego dan Christine S. Tooy, *Wewenang Penuntut Umum
Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, *Lex Crimen* Vol. IX/NO.4/Okt-
Des/2020

4. Putusan Pengadilan

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/8c4c7ad2385b2d5b0e81c916bad018.htm>. putusan pengadilan negeri padang Nomor 11/Pid.Sus
TPK/2020/PN.Pdg

